

SETELAH MAKAN DAGING KAMBING Belasan Warga Keracunan

SUKOHARJO (KR) - Belasan warga Dukuh Dliyun RT 01 RW 02 Desa Dalangan Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, diduga keracunan usai menyantap masakan daging kambing saat acara ruwahan, Jumat (23/2). Kasus tersebut sudah ditangani Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sukoharjo.

Kepala Puskesmas Tawang Sari Rahardi mengatakan kejadian bermula saat ada warga yang membawa makanan olahan daging kambing untuk kegiatan ruwahan. Makanan olahan daging kambing tersebut kemudian dimakan warga yang hadir dalam acara tersebut. Selang tidak lama usai menyantap makanan olahan daging kambing tersebut, warga merasakan gejala mirip keracunan. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada petugas kesehatan setempat. Petugas kesehatan seperti bidan desa dan petugas medis kemudian datang dan melakukan penanganan.

"Ada 19 warga yang mengalami gejala perut mulas, diare, dan gejala ringan lainnya. Atas kejadian itu kami membuka posko di Desa Dalangan untuk memberikan penanganan pada korban," jelas Rahardi. Puskesmas Tawang Sari sudah melakukan penanganan terhadap warga. Dari hasil pemeriksaan, diketahui tidak ada warga yang mendapat perawatan di UGD. Warga yang terkena keracunan massal hanya menjalani rawat jalan. Meski diperbolehkan pulang dan hanya menjalani rawat jalan saja, mereka tetap dipantau dari petugas medis.

Selain memantau kondisi 19 warga tersebut, Puskesmas Tawang Sari juga melakukan uji sampel random terhadap 100 warga yang ikut acara ruwahan. Hal ini dilakukan untuk memastikan dan mengetahui perkembangan dari kasus tersebut. "Uji dilakukan terhadap sampel makanan dan warga. Semua sudah ditangani oleh petugas dan melibatkan langsung DKK Sukoharjo," ungkap Rahardi. (Mam)-d

2 ANGGOTA TRANTIB MENINGGAL KPU Serahkan Santunan



KR-Abdul Alim

Penyerahan bantuan tali asih kepada keluarga keluarga Sulardi anggota Trantib TPS.

KARANGANYAR (KR) - KPU Kabupaten Karanganyar menyerahkan santunan bagi keluarga anggota trantib TPS Pemilu 2024 yang meninggal dunia usai coblosan. Santunan Rp 46 juta diberikan kepada Sulardi, trantib TPS 24 Dusun Kacangan Desa Tawang Sari Kecamatan Kerjo. Ia sempat menuntaskan tugasnya di TPS hingga mengawal logistik pemilu di PPS. Beberapa hari setelah itu, Sulardi jatuh sakit kemudian meninggal dunia.

Ketua KPU Karanganyar, Daryono menyampaikan, santunan diberikan kepada keluarga Almarhum. Aturan pemberian santunan tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2024 soal petunjuk teknis pemberian santunan kepada badan ad hoc. "Sesuai aturan, besaran santunan bagi badan ad hoc pemilu yang meninggal dunia berkaitan tugasnya," jelasnya usai penyerahan santunan, Rabu (21/2).

Menurut Daryono, ada dua petugas ketertiban yang meninggal dunia di Kabupaten Karanganyar. Suwarso petugas ketertiban TPS 13 di Desa Buran Kecamatan Tasikmadu juga meninggal dunia, beberapa waktu lalu. "Sulardi belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga santunan diberikan KPU Karanganyar. Sedangkan Suwarso sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga santunan akan dikover BPJS Ketenagakerjaan," ungkapnya.

Disebutkan, tercatat ada 9 orang badan ad hoc di Kabupaten Karanganyar yang sakit setelah tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Mereka terdiri 7 anggota KPPS dan 2 PPS. "Juga ada beberapa orang yang sempat dirawat di rumah sakit, namun saat ini sudah pulang semua," tutur Daryono. (Lim)-d

JAJARAN PANWASLU DI BANYUMAS 21 Orang Sakit Kelelahan



KR-Istimewa

Panwascam Baturraden sedang menengok anggotanya yang sakit.

BANYUMAS (KR) - Sebanyak 21 orang dari jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Banyumas selama tahapan Pemilu 2024 sakit. Mereka mengalami sakit akibat kelelahan dalam menjalankan tugasnya. Komisiner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banyumas, Amin Latif, Jumat (23/2) menjelaskan, 21 orang yang mengalami sakit itu terdiri 12 Pengawas TPS (PTPS), 2 Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), 5 Panitia Pengawas Desa (PKD), dan 2 Staf Sekretariat.

"Meski ada beberapa PTPS yang mengalami sakit, mereka hanya mengalami sakit kategori sedang, bukan sakit yang parah," kata Amin. Saat ini mereka yang mengalami sakit sedang harus menjalani rawat jalan atau rawat inap.

Berkaitan kinerja petugas pengawas Pemilu, komisiner Bawaslu Banyumas menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua Pengawas TPS yang telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga integritas dan kelancaran Pemilu di Kabupaten Banyumas. (Dri)-d

PROPEMPERDA 2024 DIUBAH

Pemkab Purbalingga Tambah 5 Raperda

PURBALINGGA (KR) - DPRD dan Pemkab Kabupaten Purbalingga menyepakati perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2024. Dari 17 Raperda dalam Propemperda tahun 2024 yang sudah disepakati, terdapat 6 Raperda telah ditetapkan menjadi Perda di awal tahun 2024 ini, sehingga Raperda prioritas perlu ditambah.

"Dengan mengeluarkan enam raperda lunturnya, maka diganti dengan 5 peraturan daerah prioritas pemerintah daerah tahun 2024," KATA Bupati Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) dalam Rapat Paripurna DPRD, Jumat (23/2).

Enam raperda lunturnya yang sudah ditetapkan menjadi perda, masing-masing Raperda tentang Pemberdayaan Desa Wisata, Raperda tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Raperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Purbalingga Ta-

hun 2023-2048, Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Lima raperda tambahan sekaligus pengganti 6 raperda tersebut meliputi Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Raperda tentang Penyertaan Modal Pemkab Purbalingga Kepada BUMD dan PT BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga, Pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (LKMD/LKMK) di Kabupaten Purbalingga, Raperda tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan

Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045.

"Raperda Perubahan Penyertaan Modal Pemda kepada BUMD diusulkan untuk mendukung Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu penerima proyek pengembangan sistem pertanian terpadu di daerah dataran tinggi (upland)," jelas Tiwi.

Sementara itu, Raperda Penyertaan Modal Pemda kepada PT BPR Syariah

Buana Mitra Perwira diusulkan untuk memperkuat modal BUMD tersebut untuk jangka waktu 2025-2029. Raperda tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik dan daya saing daerah, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi.

Raperda tentang Pen-

cabutan Perda Nomor 8 Tahun 2017 dilakukan karena Perda tersebut sudah tidak relevan karena ada perubahan regulasi di atasnya. Selanjutnya, pengaturan mengenai LKMD/LKMK cukup diatur melalui Perbup. Raperda tentang RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 diusulkan, karena Perda Nomor 1 tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Purbalingga tahun 2005-2025 akan segera berakhir sehingga perlu diganti. (Rus)-d



KR-Toto Rusmanto

Bupati Dyah Hayuning Pratiwi menandatangani kesepakatan Raperda menjadai Perda dalam rapat paripurna DPRD Purbalingga.

PENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT SUKOHARJO

Distribusi Bahan Pokok Harus Dipercepat

SUKOHARJO (KR) - Masyarakat diminta tenang dan distributor wajib mendistribusikan barang dan tidak boleh melakukan penimbunan terkait bahan pokok pangan. Karena permintaan dipasaran tinggi di tengah kondisi kenaikan harga bahan pokok, distribusi harus dipercepat sampai di pasaran.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani menyatakan bahwa Pemkab Sukoharjo mengungkapkan, meskipun harga beras, khminta kepada masyarakat untuk tenang. Sebab kebutuhan bahan pokok naik, stok di pasaran tersedia. Kenaikan harga tersebut seperti terjadi pada komoditas beras sejak beberapa pekan lalu. "Meski harga naik, Pemkab Sukoharjo melihat stok beras masih aman. Beras

masih tersedia di pedagang pasar, dengan harga bervariasi," tandasnya.

Karena itu, Pemkab Sukoharjo meminta masyarakat tenang, termasuk tidak melakukan aksi borong beras. Distributor juga diminta mempercepat distribusi dan penyaluran kebutuhan bahan pokok pangan. Dengan sistem tersebut, diharapkan barang selalu tersedia di pasaran dan mam-

pu menekan kelangkaan bahan pokok. "Distributor dilarang menimbun bahan pokok pangan, sebab tindakan tersebut jelas melanggar aturan dan dapat dikenakan sanksi sesuai aturan berlaku," tegas Etik Suryani.

Menurutnya, ketersediaan bahan kebutuhan pokok pangan masih aman hingga Ramadan Ramadhan dan Lebaran. Pemkab Sukoharjo melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait juga sudah melakukan pemantauan stok dan harga bahan kebutuhan pokok pangan. Petugas wajib mendatangi pasar tradisional, pusat perdagangan dan gudang penyimpanan. Termasuk memantau distribusi barang dari pro-

dusen atau gudang tempat penyimpanan ke pasaran.

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo, Bagas Windaryatno, juga mengatakan stok beras di pasaran masih mencukupi. Namun kenaikan harga beras tidak dapat dibendung karena tingginya permintaan pasar. Beras dari hasil panen padi petani Sukoharjo bahkan laku terjual untuk memenuhi kebutuhan pangan beberapa daerah.

"Harga beras memang ada kenaikan, tetapi untuk stok masih aman dan mencukupi. Sedangkan panen padi petani di Kabupaten Sukoharjo perkiraan kami sekitar Maret-April mendatang," tandas Bagas. (Mam)-d

KERJA SAMA SBI DAN PEMKAB WONOSOBO

Olah Sampah Jadi Bahan Bakar Alternatif

WONOSOBO (KR) - PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo menjalin kerja sama untuk pengelolaan sampah menjadi bahan bakar alternatif atau RDF (Refuse-Derived Fuel) yang akan digunakan Pabrik SBI di Cilacap. Kerja sama ini direstikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara SBI yang diwakili Direktur Manufacturing, Soni Asrul Sani dengan Bupati Wonosobo, H Afif Nurhidayat SAG di Ruang Pringgitan Pendapa Bupati, Rabu (21/2).

Soni Asrul Sani mengatakan, SBI menyambut baik kesepakatan ini dan berkomitmen untuk mendukung pengembangan infrastruktur dan teknologi yang diperlukan agar proyek ini terim-

plementasi.

Wakil Bupati Wonosobo Muhammad Albar mengatakan, kerja sama ini bertujuan untuk mem-

fasilitasi pengelolaan sampah menjadi RDF yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan

oleh industri semen seperti yang telah diterapkan di SBI Pabrik Cilacap.

Untuk sukses ini, kata Muhammad Albar, Pemkab Wonosobo telah membangun tempat pengolahan sampah dengan metode pengolahan sampah Reduce, Reuse dan Recycles atau TPS3R, Pusat Daur Ulang (PDU), maupun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di beberapa kecamatan. Dengan adanya berbagai fasilitas yang ada, maka didorong atau diarahkan agar sampah sampah tersebut diolah menjadi RDF.

Selain membantu meningkatkan kondisi lingkungan yang lebih sehat, pengelolaan sampah menjadi RDF juga akan membantu peningkatan ekonomi sirkular di daerah. (Fie)-d



KR-Istimewa

Direktur Manufacturing PT SBI Soni Asrul Sani dan Bupati Wonosobo H Afif Nurhidayat SAG menunjukkan MoU yang telah ditandatangani.

MERIAHKAN HUT KE-41 PUDAM TIRTA LAWU

Bazar Sembako Murah di Karangpandan

KARANGANYAR (KR) - Bazar sembako murah dalam rangka HUT ke-41 PUDAM Tirta Lawu Karanganyar, Jumat (23/2), diserbu kalangan ibu rumah tangga di Watugambir Park Desa Karang Kecamatan Karangpandan. Sebanyak 500 paket sembako ludes terjual dalam waktu satu jam. Sembako yang dijual Rp 50.000 perpaket berisi 5 kilogram beras kualitas medium, satu liter minyak goreng, dan satu kilogram gula. Tiap paket sembako disubsidi Rp 31.000.

"Sesuai arahan dari Pemkab, puncak acara sebaiknya ikut membantu masyarakat dengan masalah tingginya harga beras. Maka, kami berikan

subsidi di pasar murah sembako," kata Prihanto, Dirut PDAM Tirta Lawu.

Di pasar murah itu, warga tak hanya boleh menebus sembako. Namun juga dipersilakan ikut jalan sehat, ambil kupon doorprize dan menikmati hiburan musik puncak kegiatan hari jadi. Prihanto mengatakan perayaan HUT tahun ini melibatkan masyarakat secara jempit bola. "Kita lakukan gerakan tanam 500 pohon, tebar 11.000 benih ikan, pelepasan 41 burung derkuku simbol Kabupaten Karanganyar dan pembagian ratusan paket sembako," jelasnya.

Penjabat (PJ) Bupati Karanganyar Timotius Suryadi mengatakan, bazar pangan murah terus

digelar Pemkab Karanganyar sebagai upaya mengendalikan laju inflasi karena kenaikan harga komoditas beras. Di mana saat ini harga komoditas pangan tersebut mencapai Rp15.000 perkilogram. "Kami terus berupaya menekan kenaikan harga sembako terutama beras dengan pasar murah. Dan kali ini mengajak PUDAM sebagai BUMD kita," ungkap dia.

Menurut Timotius, bazar pangan murah akan terus digelar di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar. Hingga kini, Pemkab sudah mengadakan 12 kali pasar murah tersebar di berbagai wilayah di Karanganyar. Pasar murah akan digelar sampai menjelang

Ramadan nanti.

"Hal ini untuk menjaga agar harga kebutuhan pokok tidak melambung tinggi saat Ramadan, bahkan sampai Lebaran nanti. Kami juga menjamin

ketersediaan stok aman sampai Lebaran nanti. Kami yakin harga beras akan turun saat musim panen raya tiba di Maret-April nanti," tandas Timotius. (Lim)-d



KR-Abdul Alim

Pj Bupati Karanganyar Timotius Suryadi menyerahkan paket sembako di pasar murah.